

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Politik

Menurut *Guno Triharcito*, politik di artikan sebagai, konsep “*polis*” dalam bahasa Yunani merujuk pada kota atau suatu komunitas. Selain itu, dalam bahasa

Yunani, yaitu “*politea*” dapat diartikan sebagai warga negara, negara, kesejahteraan, atau cara hidup. Polis dapat dipahami sebagai sebuah entitas yang mencakup tidak hanya aspek geografis, tetapi juga aspek sosial, politik, dan budaya dari suatu komunitas. Istilah “*politea*” menggambarkan hubungan yang erat antara individu sebagai warga negara dengan negara, serta saling mempengaruhi dalam mencapai kesejahteraan bersama. pemahaman Guno Triharcito tentang konsep *polis* dan *politea* dalam bahasa Yunani menunjukkan kompleksitas dan kedalaman makna dari istilah-istilah tersebut. Polis tidak hanya dipandang sebagai sekadar entitas geografis, tetapi merupakan identitas warga negara, struktur pemerintahan, dan cara hidup masyarakat yang sejahtera.¹¹

Karl W. Deutsch, memberikan pengertian tentang politik sebagai pengambilan keputusan secara umum dengan kata lain pengambilan keputusan yang di maksud adalah pengambilan keputusan yang sifatnya

¹¹ Parel T. J., M.Pd.K dan Dr, Maidiantus T, J. *Politik Yesus Bagi Bangsa Indonesia*, PT. Matana Bina Utama. 2014, hlm 18

tidak pribadi, melainkan keputusan yang sifatnya mementingkan kepentingan secara umum¹²

Kemudian Pdt. E.G memberikan defenisinya tentang politik yang merupakan keterampilan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan oleh individu dengan kepentingan yang beragam yang memberikan hasil dan berdampak bagi masa depan orang dan masa depan bangsa,¹³ kemudian Karl Duetch berpendapat bahwa baginya politik adalah bagian yang menyangkut negara pemerintah maupun manusia yang membuat keputusan yang dilakukan masyarakat.¹⁴

Budiardjo, menekankan bahwa tujuan dari politik adalah mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi,¹⁵ Eric Louw memberikan pandangan lebih luas bahwa politik mengandung sejumlah ketatanegaraan, yakni menyangkut konsep kekuasaan pengambilan keputusan dan kebijakan dan pembagian lokasi sumber daya, Johannes Laemena, seorang Teolog awam memberikan makna tentang politik yaitu sebagai seni dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, politik bukan bentuk kekuasaan atau perebutan kekuasaan melainkan sebagai pelayanan kepada Tuhan lewat pengetahuan dan iman yang di miliki dalam melayani sesama.¹⁶

¹²Andreas pandiangan,*Pengantar Ilmu Politik*, Universitas Katolik Soegijapranata.Semarang 2017, hlm 21

¹³ Emanuel Gerrit singgih, Ph. D, *Iman & politik dalam era reformasi di Indonesia*, PT BPK Gunung mulia,2004, hlm 27

¹⁴Hamonangan saut sirait.*Politik Kristen di Indonesia*. PT BPK Gunung Mulia, 2006 hlm 24

¹⁵ Hafied Cangara.*Komunikasi Plitik, Konsep Teori dan Strategi*,PT rajagrafindo persada,2018.hlm 24

¹⁶Melatawun. Pemilihan kepala desa, Teologi Politik, dan Peran Gereja: Analisis Kritis di desa dan Jemaat Abat, Maluku. *ARMBE:Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, 4(2), hlm 10

Inti dari politik adalah bagaimana masyarakat dapat mengatur hidup bersama untuk mencapai kesejahteraan, secara khusus politik menjadi pilar masyarakat dalam mengambil keputusan kepada seseorang yang akan menjadi pemimpin dan mengatur kehidupan sekelompok rakyat secara bersama, yang penting adalah masyarakat harus memilih pemimpin yang dianggap mampu mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan dan kebaikan di dalam masyarakat, oleh sebab itu politik bukanlah kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang atau upaya untuk menjadi penguasa di dalam kelompok masyarakat,¹⁷

Melihat pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa sasaran dari politik mencakup keberadaan masyarakat dalam suatu *polis* atau negara untuk hidup bersama dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan, salah satunya adalah masyarakat yang terlibat dalam memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara pada kandidat dalam pemilihan umum.¹⁸

B. Teologi Politik

Istilah teologi politik digunakan secara luas sejak 1960-an dan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh para teologi Katolik dan Protestan untuk mengatasi krisis kebudayaan dengan dasar-dasar kekristenan dalam terang abad XX. Di zaman Romawi kuno, konsep teologi politik digunakan untuk memberikan legitimasi pada kekuasaan negara. Salah satu pandangan tentang legitimasi teologis terhadap politik negara, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes, adalah keyakinan bahwa

¹⁷Tiranda Petrus Dkk, *Kepemimpinan Berwawasan Nusantara*, Surakarta 2019, hlm 6

¹⁸ Hafied Cangara, hlm 32

manusi secara alamiah cenderung menuju kepada destruksi satu sama lain. Oleh karena itu, Hobbes berpendapat bahwa diperlukan dominasi negara yang harus di akui secara teologis agar dapat menciptakan kondisi yang baik dalam kehidupan bersama.¹⁹

Teologi politik menyoroti diamensi publik dari pengumuman-pengumuman eskatologis dalam agama kristen. Janji janji Allah yang telah kita anut dan perjuangkan tidak hanya berkaitan dengan transformasi individual manusia menjadi yang baru melainkan juga terkait dengan pembentukan komunitas yang baru masyarakat baru, bumi baru, langit baru, dimana tatanan masyarakat menjunjung tinggi kedamaian dan kesetaraan²⁰ yang kedua teologi politik memberikan pemahaman pentingnya kesaksian iman secara publik dan tindakan mengikut²¹

Kalden menguti pendapat Metz mengatakan bahwa teologi politik merupakan induk darisemua pengetahuan, dengan tatanan nilai masyarakat yang menentukan cara kehidupan bersama manusia untuk mengungkapkan relevansi politisi dari iman, dan mendampingi masyarakat secara kritis dalam setiap situasi menuju masa depan²²

Kemudian John Howard, memberikan pengertian tentang teologi politik sebagai teologi yang berlandaskan pada karya Yesus Kristus, ia menekankan teologi politik harus melekat pada diri orang percaya dengan

¹⁹Gerrit Singgih, *dalam pergaulan gereja dan masyarakat*, PT BPK Gunung Mulia 2015.hlm 170-171

²⁰*Ibid.* hlm168

²¹Hartono budi, *Teologi pendidikan dan pembebasan*, Kansius Yokyakarta2003 hlm 38

²²Gerrit Singgih,hlm 171

tujuan memperkenalkan sang Kristus dan kekuasaan Allah dalam dunia ini.²³

Teologi politik Augustinus, yang dalam karyanya *"City of God"*, menyatakan bahwa kebenaran Tuhan harus menjadi fondasi bagi para penguasa dalam memperluas kekuasaan mereka. Kebenaran Tuhan akan mengarahkan para penguasa untuk memberikan pelayanan yang tulus dan penuh pengorbanan bagi masyarakat yang mereka pimpin. Augustinus menyebut para penguasa yang demikian sebagai *"good men"*. Sebaliknya, *"wicked men"* adalah para penguasa yang melakukan hal-hal jahat bagi diri mereka sendiri dan masyarakat yang mereka pimpin. Pada akhirnya, Augustinus menyatakan, *"A good man, though a slave, is free; but a wicked man, though a king, is a slave"*, yang berarti bahwa ajaran gereja tentang kebenaran Tuhan seharusnya disampaikan dengan tegas kepada para pemimpin yang jahat yang sedang berkuasa saat itu, untuk meluruskan tindakan mereka.²⁴

Dengan demikian teologi politik dapat dipahami sebagai pemikiran teologis tentang politik dan cara politik dilakukan. Ini tidak hanya bertentangan dengan kepentingan gereja atau umat kristen saja, melainkan juga tentang ikut serta dalam upaya memperjuangkan politik demokratis untuk mencapai keadilan sosial. Teologi politik menjalin kaitan antara iman kepada Tuhan dengan kehidupan bersama, dan tujuan yang ditetapkan bersama melalui proses musyawarah atau demokrasi. Praktik

²³Jimmy Rungkat, *Teologia Politik Yesus, Perwujudan tugas sosial-politik pemimpin kristen di Indonesia*, departemen literatur multimedia, 2010. h116

²⁴Ibid, 120.

teologi politik ini mencerminkan kehidupan nyata, sejarah, dan perjuangan manusia dengan fokus pada keberlanjutan kehidupan bersama.²⁵

Menurut Luther, orang Kristen tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah dan lembaga lain bertanggung jawab untuk mendukung dan membantu mereka yang kekurangan, dan setiap warga negara harus tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Luther meyakini bahwa panggilan iman tidak dapat dipisahkan dari hierarki sosial yang ada. Dalam struktur sosial ini, orang Kristen harus menjalankan tugas panggilan iman mereka.²⁶

C. Teologi Politik Yesus

Politik sebagai dunia pelayanan dalam kekristenan, dengan tujuan untuk bertindak dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada di dalam masyarakat, bukan berarti bahwa setiap pelaku-pelaku politik baik itu pelaku politik yang menyimpang dari nilai-nilai kristiani dan norma yang sudah diatur untuk kepentingan bersama mendapat intimidasi dari kalangan orang yang menganggap diri mereka sudah melakukan yang benar, tetapi justru malah sebaliknya, sehingga dunia politik yang selama ini dianggap kotor dan disalahgunakan oleh para elite mendapatkan perubahan dengan menilai bahwa setiap persoalan yang terjadi selama ini dalam dunia politik bukanlah persoalan yang mutlak untuk terus dilakukan tetapi akan mengalami perubahan lewat pelayanan, sehingga

²⁵Rantung, D. A. (2018). Teologi politik untuk keadilan responsteologis gereja di tengah menguatnya politik identitas. *voice of wesly*, 2. 7-9

²⁶ H.W.B.Sumakul, Ph.D. *panggilan iman dalam teologi Luther dan Calvin, suatu kajian etika sosial politik dalam gereja reformasi*, PT BPK gunung mulia 2016.hlm 35

politik tidak hanya dipandang sebagai aktifitas sosial tetapi sebagai pilar untuk mendatangkan kesejahteraan. Kehadiran orang percaya dalam dunia politik memiliki tanggung jawab dalam memberi pengaruh moral yang baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga kehidupan umat percaya di tengah-tengah masyarakat dapat dinilai sebagai tindakan Kristus, lewat perannya sebagai terang dan garam di dalam dunia, tujuannya adalah agar masyarakat tidak tertimpa hal-hal yang tidak baik dan menghancurkan masa depannya.²⁷

Teologi politik Yesus menekankan bahwa dalam politik ada kebaruan rohani yang dicapai ketika politik itu diseimbangkan dengan urusan rohani,²⁸ artinya bahwa dalam politik setiap aspek tata cara dalam politik harus dilakukan tanpa menyimpang dari aturan yang berlaku.

Ini menunjukkan bahwa praktik politik uang juga merupakan bagian penyimpangan dari iman karena politik adalah bagian dari urusan rohani. Menurut Afan Gaffar, politik uang adalah tindakan untuk membagi-bagikan uang kepada seseorang untuk membeli suara mereka,²⁹ Maka dari itu politik uang merupakan penyimpangan dari perspektif politik Yesus yang menekankan bahwa dalam politik merupakan urusan rohani.

²⁷Parel, T Maidiantus. hlm 43-52

²⁸Rungkat, J. Teologi Politik Yesus: Sumbangsih Materi Bagi Mata Kuliah Pendidikan Agama Kristen Di Politeknik Amamapare Timika. *Jurnal Sosial Dan Teknologi Terapan Amata*, hlm 3

²⁹Dr. H. Sabilah Rosyad, M.S.I. *Praktik money politik dalam perspektif sosial legal normatif* PT. Nasya Expanding Management, 2021 hlm 2

Dalam Alkitab, Yesus sebagai tokoh politik tidak secara langsung digambarkan sebagai tokoh yang terlibat dalam politik praktis seperti yang dipahami sekarang namun ada beberapa ucapan yang dianggap memiliki implikasi politik diantaranya dalam hal keadilan sosial dan kritik terhadap otoritas agama, salah satu ayat Alkitab yang menjadi landasan implikasi Yesus sebagai tokoh politik dalam Lukas 4:18-19, tindakan politik Yesus dalam ayat ini adalah datang mengkritik ketidakadilan dan mendukung orang-orang yang tertindas dengan menawarkan kasih dan keadilan. Pesan ini mengandung implikasi yang sangat kuat dalam konteks sosial dan politik karena membela orang-orang yang tertindas dan membebaskannya, sehingga dalam praktik politik yang modern ini pesan-pesan yang ingin disampaikan Yesus dalam konteks politik yaitu politik yang mendatangkan kesejahteraan dalam masyarakat, dengan cara berpolitik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk mewujudkan kerajaan Allah.

D. Demokrasi

Asal muasal kata demokrasi dapat dilihat dalam bahasa Yunani kuno yang berasal dari dua kata, yakni *demos* yang merujuk pada rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, demokrasi juga dipandang sebagai kodrat manusia untuk saling berdampingan dan disebut sebagai kerakyatan. Ini menyiratkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, dalam berkehidupan

bernegara demokrasi mengandung arti bahwa rakyat yang memiliki otoritas untuk mengenali masalah-masalah termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah.³⁰

Dalam pandangan tradisional, demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh berbagai pihak atau *Rule by the many* atau sebagai pemerintahan oleh rakyat atau *rule by the people*. Prinsip dasar demokrasi menekankan pada dua hal utama yang saling terkait, representasi menggabung perhatian terhadap kepentingan mayoritas atau masyarakat umum, sementara partisipasi mencerminkan keinginan dan keterlibatan public dalam urusan politik. Dalam pandangan barat, demokrasi diartikan sebagai suatu sistem politik yang ditandai bukan hanya oleh pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, melainkan juga pemisahan kekuasaan antara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta penerapan kekuasaan yang diatur oleh hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan hak-hak pribadi individu.

Robert A. Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk kesatuan masyarakat dengan masyarakat yang lain artinya setiap masyarakat mempunyai hak yang sama³¹ Young dalam Gan dkk menjelaskan bahwa demokrasi merupakan proses pencapaian kondisi ideal yang tidak pernah terwujud secara sempurna. Namun, demokrasi mencakup sisi penting seperti pemerataan dalam politik, kebebasan berekspresi, representasi, dan

³⁰Noor Ms bakry, *Pendidikan Kewarga negaraan*, Pustaka pelajar, 2015 hlm 177

³¹Sholahuddin H, Abdul DKK, *Hukum Pemilu di Indonesia*, PT sada kurnia pustaka, 2023

penerimaan luas atas aturan yang berlaku. dalam demokrasi, pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum *rule of law* mendorong kebebasan dan hak-hak individu, serta menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan bebas.³²

Menurut Abraham Lincoln demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat³³ sistem demokrasi, terdapat beberapa model yang berbeda, yaitu demokrasi langsung, demokrasi partisipatif, dan demokrasi perwakilan. Demokrasi partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh rakyat dalam proses demokrasi, serta peran penting masyarakat sipil. di sisi lain, demokrasi perwakilan mengedepankan pemilihan perwakilan oleh rakyat untuk membuat keputusan dan bertindak atas nama mereka.³⁴

Johannesen, mengidentifikasi dalam demokrasi ada tatanan etika yang tercantum dalam demokrasi di mana setiap individu memiliki tanggung jawab didalam mengespresikan setiap nilai yang tercantum dalam demokrasi hal tersebut di sebutkan dalam demokrasi etika dimana dalam demokrasi harus menjadi prioritas utama serta kebiasaan yang adil, Johannesen juga mengatkan kepentingan umum lebih utama dalam menjalankan kehidupan, serta saling menghormati satu sama lain yang berbeda pendapat serta adanya budaya kritis untuk mengkritisi setiap pemerintahan yang tidak sesuai dengan demokrasi, karena dalam

³²Hafied Cangara, M.sc., Ph.D.hlm 53

³³ John W.de Gruchy.hlm 6

³⁴Ibid, 7.

demokrasi politik harus dijalankan secara demokratis dengan mengedepankan prinsip moral untuk mencapai tujuan yang baik.³⁵

Dengan demikian demokrasi adalah sistem pemerinthan di mana rakyat terlibat langsung atau melalui perwakilan dalam mengambil keputusan, dengan tujuan menciptakan masadepan yang lebih adil dan sejahtera. Rakyat memegang peranan kunci dalam sistem politik demokrasi karena rakyat merupakan penentu daan pembuat kebijakan yang nantinya akan di jalankan oleh mereka sendiri.

E. Sistem Demokrasi di Indonesia

Sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adala sistem demokrasi Pancasila yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam prinsip-prinsip demokrasi, dalam ajaran pancasila demokrasi di samakan dengan kerakyatan yang berdasarkan Pancasila yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan perwakilan*. dalam Pancasila rumusnya merupakan suatu kesatuan dan saling mengualifikasi artinya tiap sila mengadung empat sila di antaranya Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga dalam sistem demokrasi setiap warga negara disertai dengan rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi niliaip-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai religius dan menjaga kesatuan rakyat sebagai bangsa Indonesia dengan tujuan untuk mencapai negara yang demokratis.³⁶

³⁵Ibid, 393.

³⁶Noor Ms bakry ,hlm 182-183

Dalam nilai-nilai Pancasila terdapat lima aspek yang menjadi pedoman dalam menjalankan demokrasi yang sehat, di dalam dalam aspek tersebut mencakup semua kepentingan dan hak setiap orang sebagai warga negara, dalam demokrasi Pancasila di Indonesia mengutamakan setiap kepentingan rakyat serta kebebasan rakyat, untuk berekspresi menjunjung tinggi adanya kebebasan di dalam memberikan hak suara, keutamaan dari Demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, yang menggambarkan proses diskusi untuk mencapai kesepakatan berdasarkan persetujuan mayoritas³⁷

Sekaitan dengan hal diatas maka dapat di katakan bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi dimana kebebasan rakyat menjadi pondasi utama dalam sisteem demokrasi yang ada. Kemudai Thajo Kumolo, mengatakan bahwa politik uang merupakan pemberian imbalan dengan maksud untuk mengubah pilihan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, politik uang tidak selamanya berbentuk uang tetapi dapat berupa barang lainnya.³⁸ Maka dari itu setiap orang yang terlibat dalam prakti-praktik politik yang tidak sesuai dengan sistem demokrasi, merupakan penyimpangan terhdapan nilai sistim demokrasi yang ada.

Oleh sebebiu Salah satu tercapainya demokrasi di Indonesia adalah adanya partisipasi rakyat di dalam politik dengan jalan memilih seseorang

³⁷Linlin maria dan dion marendra, *Buku pemilu dan demokrasi, Komisi pemilihan umum kota bogor* 2020, hlm 8

³⁸Akhyar anshori Dkk, *Isu-isu global & konteporer analisis data dan fakta lapangan*, Umsu Press, 2021 hlm 10

individu untuk mejadi wakil atas mereka dengan tujUan agar kesejahteraan di dalam masyarakat dapat dicapai, dengan adanya perwakilan yang menyanmpaikan setiap tuntutan rakyat, untuk mencapai kesejahteraan.

F. Pemilu

Pemilihan umum atau sering disingkat sebagai pemilu adalah kewajiban masyarakat sipil untuk memilih salah satu calon anggota dewan perwakilan rakyat, sebagaimana tercantum dalam UU Dasar 1945 bahwa untuk tercapainya cita cita bangsa maka pemilihan sangat perlu untuk diselenggarakan sebagai bentuk dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintah.³⁹ Dengan demikian pemilu merupakan kompetisi untuk memilih seseorang individu untuk menjadi wakil di dalam lembaga pemerintahan, yang bersumber dari suara sah dari rakyat yang berpartisipasi dalam pemilihan. Dalam hal ini rakyat yang mempunyai peran penting dalam menyikapi keberlangsungan hidup yang tidak sesuai dengan demokrasi, hal ini juga merupakan cara bagi rakyat untuk tetap mengendalikan pemerintahan sendiri. Kondisi masyarakat yang semakin kompleks dan beragam memunculkan demokrasi representatif sebagai kebutuhan, dengan pemilihan umum sebagai cara untuk memilih perwakilannya. Kedua, pemilihan umum menjadi indikator keberadaan negara demokratis. Tidak ada negara yang diakui sebagai demokratis tanpa melaksanakan pemilihan umum, meskipun ada kasus di

³⁹Sholahuddin H, Abdul Dkk hlm 1

mana negara tersebut mungkin otoriter dalam prakteknya. Ketika demokrasi dipahami sebagai suatu metode politik, pemilihan umum menjadi unsur yang paling penting dalam menilai derajat demokrasi suatu negara.⁴⁰

Ramlan Surbakti merumuskan pemilu sebagai instrumen sebagai kedaulatan rakyat untuk mendelegasikan setiap calon yang ingin menjadi wakil rakyat dan menjalankan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat secara demokratis.⁴¹

Kemudian Jimli Asshiddiqie mengartikan pemilu sebagai ajang kompetisi masyarakat untuk memilih wakil rakyat secara demokratis dengan alasan agar wakil-wakil rakyat menjalankan tindakan atas nama rakyat sehingga dalam menentukan wakil-wakil rakyat harus melalui pemilihan yang demokratis.⁴²

Henry B Mayo, mendefinisikan demokrasi adalah sistem politik demokrasi dalam pemilihan yang diselenggarakan serta menjamin adanya suasana kebebasan dalam politik dan mengambil keputusan politik secara bebas⁴³

Adapun Pemilu memiliki asas yang menjadi pedoman masyarakat dalam menentukan pilihannya secara demokratis yang sering disingkat LUBER dan JURDIL, langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.⁴⁴

⁴⁰CK.Basuki, U. Parpol, Pemilu dan Demokrasi: *Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*

⁴¹Sholahuddin H, Abdul Dkk hlm

⁴²Fajlurrahman jurid, *Pengantar hukum pemilihan umum*, Kencana 2018 hlm 3

⁴³Sistyawan J Dwanda, *Sistem pemilu legislatif di Indonesia*. CV Adanu abimata, 2024 hlm 12

⁴⁴ Linlin maria dan dion marendra hlm 15

Ini menunjukkan praktik politik uang dalam pemilu tidak dibenarkan karena melanggar asas-asas yang sudah ditentukan artinya ketika suara rakyat dibeli dengan uang maka hak suara rakyat tidak lagi berlandaskan pada asas pemilu, karena politik uang merupakan pengaruh atau upaya untuk mengalihkan atau membelokan pendapat orang lain dalam menentukan pilihannya, dengan artian praktik jual beli suara selama proses politik, baik untuk kepentingan pribadi maupun partai, dengan tujuan mempengaruhi hak suara pemilih dengan demikian, politik uang merupakan bentuk usaha untuk mempengaruhi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya, dengan cara menjanjikan atau memberikan imbalan materi, agar mereka dapat memilih pasangan atau kandidat tertentu. Praktik ini dapat merusak integritas proses demokrasi yang sehat, dan menghambat pemilihan yang adil dan bebas.⁴⁵

Jelas bahwa keberlangsungan pemilu dalam suatu negara merupakan ajang masyarakat untuk terlibat dalam politik secara langsung, serta adanya pemilihan umum yang merupakan perwujudan demokrasi, di mana peran rakyat sebagai pengendali pemerintahan akan di capai melalui proses pemilihan umum yang memprioritaskan keadilan, dan kejujuran lewat asas-asas pemilu.

⁴⁵ Hafied Cangara, hlm 234.